

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan untuk menjalani pernikahan di Indonesia, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang No1 Tahun 1974 dalam pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan keharusan pencatatan nikah dan pelaksanaan pencatatan agar terjaminnya ketertiban perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan mengenai pencatatan nikah, khususnya dalam pasal 2 Undang-undang No1 tahun 1974 menimbulkan ambiguitas terhadap pemaknaan yang terdapat dalam pasal 2 tersebut. Karena dalam pasal 2 Undang-undang No1 tahun 1974 tidak menjelaskan dengan jelas, apakah pencatatan pernikahan tersebut hanya sebagai bagian dari administratif yang tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya pernikahan. Atau pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan.¹ Penafsiran pendapat ini bersumber dari posisi ayat 1 dan 2 dari pasal 2 Undang-undang No1 tahun 1974 saling terpisah atau merupakan satu kesatuan. Jika merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No1 Tahun 1974 mengenai konsep perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

dengan tujuan untuk membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa.

Adanya pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan nikah memunculkan Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama, paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah siriyang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirimasa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sahnya nikah yaitu, adanya mempelai laki laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada katai'lamun nikah dalam bentuk *walimatul'ursy* atau dalam bentuk nama lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi tetapi tidak dictatatkan di KUA atau catatan sipil sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan Istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan pernikahan di bawah tangan. Nikah siriyang dikenal masyarakat seperti di sebutkan diatas muncul setelah diundangnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksana undang-undang No.1 tahun 1974 dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. dalam pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974.

Di Indonesia, eksistensi nikah siri menimbulkan Pro Kontra dikalangan ormas ormas Islam seperti dikalangan Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah. Menurut pendapat yang Pro terhadap nikah siri, pernikahan tersebut sah menurut agama hanya saja tidak tercatat di KUA. Nahdatul Ulama (NU) adalah yang berpendapat tentang bolehnya melakukan pernikahan siri.² Sedangkan dikalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan hal yang sebaliknya, Muhammadiyah tidak mengesahkan nikah siri. Menurut Muhammadiyah fungsi dari pencatatan nikah sama dengan fungsi saksi, bahkan lebih penting perannya.³

Penelitian ini mencoba mengangkat dua pandangan, antara Muhammadiyah yang tidak mengesahkan nikah siri dan Nahdhatul Ulama (NU) yang membolehkan nikah siri.⁴ Di lihat dari peran kedua organisasi besar ini, tentu pandangan pernikahan siri ini memiliki dampak pada umat Muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi perundang-undangan Indonesia umumnya dan tentang pernikahan khususnya.

²Muhammad Zaini, " *Hukum Nikah Siri Dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah*"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011), 3.

³*Ibid.*

⁴Fatwa Tarjih, Hukum Nikah siri. 'Suara Muhammadiyah, No 12, Ke 92(Juni 2007),38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Apa Metode Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) dalam menetapkan Hukum Nikah siri?
2. Apa Metode Nahdatul Ulama (NU) dalam menetapkan Hukum nikah siri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Dalam rangka menjelaskan status Nikah Siri yang berkembang di Indonesia baik menurut Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 ataupun pandangan dalam hukum Islam secara umum.
 - b. Untuk menggambarkan pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama terhadap status nikah siri karena kedua Ormas tersebut memiliki perbedaan metode dan keduanya merupakan organisasi yang memiliki pengaruh kuat di kalangan umat Islam khususnya Indonesia.
2. Kegunaan penelitian
 - a. memberikan wawasan dan keilmuan baik dalam dunia akademik maupun dalam praktek kehidupan.
 - b. Memperluas khazanah keilmuan memetakan pemikiran dua ormas besar Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dengan

harapan hasil penelitian ini dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk di kembangkan lebih jauh dan mendalam pada penelitian yang lain.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas Penelitian yang penulis lakukan tentang nikah siri ini bukanlah hal yang baru. Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa buku, jurnal dan skripsi yang mengulas atau yang membahas permasalahan nikah siri. Penulis menemukan sebuah buku yang cukup menarik, sebuah penelitian terhadap praktek nikah siri dikalangan mahasiswa Jogja yang di lakukan oleh Dadi Nurhaiedi dengan judul buku, *Nikah di bawah tangan; peraktek nikah siri maha siswa jogja*.⁵

Penulis buku ini menginterview beberapa mahasiswa yang melakukan praktek nikah siri. Menurut data yang di dapat oleh dedi, jenis pernikahan siri yang dilakukan oleh maha siswa ini (responden) adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA. ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis praktek nikah siri umumnya, pada khususnya bagi maha siswa terkait dengan penelitian dalam membantu skripsi penulis, buku ini memberikan gambaran data sejauh mana praktek tersebut telah mengakar di kalangan masyarakat.

Salah satu diantara buku yang membahas tentang nikah siri adalah tulisan Wannimang Habsul. yang berjudul, *perkawinan terselubung Di antara berbagai pandangan*. buku ini mengulas persoalan pernikahan siri dari berbagai pandangan. Walaupun buku ini belum cukup mendalam dalam membahas nikah siri baik

⁵Dadi Nurhaiedi dengan judul buku, *Nikah di bawah tangan; peraktek nikah sirri maha siswa jogja* (Yogyakarta: Sarjana 2003)

dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif tetapi buku ini mampu mengantarkan secara ringkas terhadap pemahaman nikah siri.⁶

Tulisan yang cukup komprehensif, menyorot masalah nikah siri dalam pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan beberapa hukum di negara tetangga, adalah karangan Prof. Dr. Khoiruddin, yang berjudul *Hukum perdata islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim: Studi sejarah metode pembaharuan, dan materi status perempuan dalam hukum perkawinan keluarga Islam*.⁷ Terbilang cukup komprehensif, karena dalam penulisannya, buku ini menggunakan metode tematik dan holistik. Spesifikasi bahasan dan data dari berbagai sumber menjadikan buku ini kaya dan memberikan perbandingan dari berbagai sudut pandang, persoalan pencatatan nikah dalam buku ini di bahas berapa sistem perundang perkawinan di beberapa negara, walaupun perihal pencatatan nikah belum di temukan dalam literatur Islam, buku ini memberikan semacam gambaran dengan mengurangi masalah nikah siri dan persaksian dalam perkawinan Islam yang pungsi persaksian hampir sama dengan pencatan nikah.

Tulisan Kamal Muchtar dalam jurnal al-Jami'ah, *nikah siri di Indonesia*.⁸ memberikan pemahaman yang cukup luas dan mendalam perihal pencatatan nikah. mengharuskan dari sisi persaksian, baik dalam literatur hukum Islam dan hukum positif. Kemudian mengkaji pencatatan nikah dengan perspektif

⁶Wannimang Habsul yang berjudul, *perkawinan terselubung Di antara berbagai pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon perss, 1994)

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim: Studi sejarah metode pembaharuan, dan materi status perempuan dalam hukum perkawina keluarga Islam*, (Yogyakarta: Tazzafa, Acedemia 2009).

⁸Kamal Muchtar, "Nikah sirri di Indonesa, " *jurnal al-jami'ah*, No. 56 (1994)

usul fiqh. Dari penelusuran penulis terhadap skripsi-skripsi yang meneliti permasalahan nikah siri penulis menemukan tulisan Abdul Basith, *tinjauan hukum Islam terhadap status nikah siri di Indonesia*. Skripsi ini mengkaji permasalahan nikah siri yang terjadi di Indonesia dengan menelaah pandangan *fuqaha*; namun penulis mendefinisikan nikah siri apakah menurut Islam atau menurut hukum positif Indonesia.

Adapun tulisan Maman Suriaman kriminalisasi nikah siri dalam pandangan hukum pidana Islam, mengkaji dari sisi pidana Islam, dengan sebuah rumusan apakah nikah siri harus di kriminalkan. Dalam tulisan skripsi yang lain juga di temukan penelitian yang membahas pencatatan nikah, seperti yang di tulis Zaiful Rizal yaitu, *pencatatan nikah sebagai sistem hukum di Indonesia (studi perbandingan antara fiqh dan undang-undang No 1 Tahun 1974)* skripsi ini mencoba dan akan menelaah hukum pencatatan nikah dalam hukum Islam dengan melacak pada sumber-sumber hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqh kemudian membandingkannya dengan hukum positif.

Dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis belum menentukan buku atau penelitian yang mencoba membandingkan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam permasalahan status nikah siri oleh karena itu penulis akan mencoba mengangkat permasalahan status nikah siri sebagai wacana baru.

E. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, kami akan menguraikan jenis dari beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang mengkaji study dokumen, yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analisis, adapun pengertian dari deskriptif analisis menurut Sugiono: yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan hukum nikah siri dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) terhadap nikah siri dan kemudian memperbandingkan kedua pendapat Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) terhadap nikah siri dan pencatatan nikah untuk menentukan perbedaan yang melatar belakangnya.

3. Objek penelitian

Objek penelitian penulis adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, akan tetapi yang menjadi bidikan penelitian penulis bukan pada Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama secara kelembagaan akan tetapi kultural keilmuan yang dikaji oleh Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Dengan jenis penelitian semacam ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Karena ini adalah kajian pustaka, maka pengumpulan datanya di lakukan secara literatur yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, baik yang sifatnya primer atau pun sekunder

2. Analisis Data

Analisis data adalah konkrit untuk memberikan interpretasi terhadap data-data yang telah tersedia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena data-data yang di gunakan adalah data kualitatif, serta penjelasannya dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan kalimat.

3. Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushuliy*, yaitu untuk melacak metodologi Nahdatul Ulama(NU) dan Muhammadiyah dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil keputusannya menggunakan kaidah-kaidah *ushuliy*.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya memudahkan pemahaman beberapa ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulis skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam suatu sistematika pembahasan sedemikian rupa.

Skripsi ini terdiri dari 4 bab setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang di dalamnya diuraikan garis besar penulisan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka, teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasannya. Bab I ini merupakan perangkat dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang akan menjadi landasan bagi bab-bab lainnya.

BAB II Memahami Tentang pengertian nikah dan pengertian nikah siri secara umum, berbagai teori serta latar belakang kemunculannya. Pembahasan nikah siri akan dilihat dari berbagai segi, yaitu dari hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta tujuan pemikiran terhadap nikah siri.

BAB III Membahas Tentang sejarah profil Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang meliputi sejarah kedua ormas tersebut, baik secara kultural maupun kelembagaan, serta bagaimana metodologi Istisbath hukum keduanya.

BAB IV Bagian penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

